



**Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian**

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



pn-pasirpengaraian.go.id



[pnpasirpengaraian](https://www.instagram.com/pnpasirpengaraian)



[pengadilannegeripasirpengaraian](https://www.facebook.com/pengadilannegeripasirpengaraian)



0811754433 (PTSP Online)



RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 ini dibuat berdasarkan Reviu Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Yang Agung”

Dengan misi :

1. Menjaga kemadirian Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
2. Memberi Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2024 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir:

Tabel 1 Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	99%	99%	99%	99%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	99%	99%	99%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	90%	90%	90%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	90%	90%	90%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	1%	1%	1%	1%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99%	99%	99%	99%

Tabel 2 Rencana Aksi Sasaran Strategis 1

NO	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Indikator: Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu								
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara perdata yang lebih dari 5 bulan	√	√	√	√	Terdapat dan teridentifikasi potensi penyelesaian perkara perdata	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Dana bersumber dari biaya proses pihak yang berperkara
2	Melaporkan dan mencari solusi perkara perdata yang tidak diselesaikan tepat waktu	√	√	√	√	Laporan perkara perdata yang tidak diselesaikan tepat waktu	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
3	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan	√	√	√	√	Persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
4	Menunda persidangan tidak terlalu lama	√	√	√	√	Penundaan sidang yang tidak lama	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	

5	Memutus perkara perdata tidak lebih dari 5 bulan	√	√	√	√	Perkara diputus tepat waktu	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
1.2 Indikator: Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu									
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara pidana yang lebih dari 5 bulan	√	√	√	√	Terdata dan teridentifikasi potensi penyelesaian perkara pidana	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	92.000.000
2	Melaporkan dan mencari solusi perkara pidana yang tidak diselesaikan tepat waktu	√	√	√	√	Laporan perkara pidana yang tidak diselesaikan tepat waktu	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
3	Melaksanakan persiangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan	√	√	√	√	Persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
4	Menunda persidangan tidak terlalu lama	√	√	√	√	Penundaan sidang yang tidak lama	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
5	Memutus perkara pidana tidak lebih dari 5 bulan	√	√	√	√	Perkara diputus tepat waktu	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
1.3 Indikator: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding									
1	Mendata perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	√	√	√	√	Laporan perkara pidana dan perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	2.900.000
1.4 Indikator: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi									
1	Mendata perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	√	√	√	√	Laporan perkara pidana yang diputus bebas dan perdata permohonan yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	5.000.000
1.5 Indikator: Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi									
1	Melakukan musyawarah untuk mendamaikan para pihak	√	√	√	√	Terlaksananya musyawarah antara para pihak	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	92.000.000
2	Membuat laporan diversi berhasil	√	√	√	√	Laporan hasil diversi	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
3	Membuat penetapan diversi (jika diversi berhasil)	√	√	√	√	Penetapan diversi	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
4	Menetapkan hari sidang (jika diversi gagal)	√	√	√	√	Penetapan hari sidang	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	

1.6	Indikator: Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan								
1	Membentuk tim survey kepuasan masyarakat	√	√	√	√	Tim survey kepuasan masyarakat	Dukungan manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	4.812.241.000
2	Menyusun jadwal pelaksanaan dan kebutuhan survey kepuasan masyarakat	√	√	√	√	Jadwal pelaksanaan survey	Dukungan manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	
3	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat melalui aplikasi Sisuper	√	√	√	√	Pengisian aplikasi sisuper oleh pengunjung	Dukungan manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	
4	Mendata dan mengumpulkan hasil survey kepuasan masyarakat	√	√	√	√	Kumpulan data hasil survey kepuasan masyarakat	Dukungan manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	
5	Menyusun laporan survey kepuasan masyarakat	√	√	√	√	Laporan hasil survey kepuasan masyarakat	Dukungan manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	
6	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat dan menindaklanjuti hasil survey	√	√	√	√	Laporan evaluasi hasil survey kepuasan masyarakat	Dukungan manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	

Tabel 3 Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20	20	20	20

Tabel 4 Rencana Aksi Sasaran Strategis 2

NO	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
2.1	Indikator: Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu								
1	Membuat putusan perdata sebelum sidang pembacaan putusan	√	√	√	√	Putusan perkara perdata	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Dana bersumber dari biaya proses pihak yang berperkara
2	Menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP	√	√	√	√	Data putusan perkara perdata di SIPP	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
3	Mengunggah salinan putusan ke SIPP	√	√	√	√	e-doc salinan putusan perkara perdata	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
4	Menyediakan salinan putusan perkara setelah sidang pembacaan putusan.	√	√	√	√	Salinan putusan perkara perdata	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
2.2	Indikator: Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu								
1	Membuat putusan perdata sebelum sidang pembacaan putusan	√	√	√	√	Putusan perkara pidana	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	14.600.000
2	Menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP	√	√	√	√	Data putusan perkara pidana di SIPP	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
3	Mengunggah salinan putusan ke SIPP	√	√	√	√	e-doc salinan putusan perkara pidana	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
4	Menyediakan salinan putusan perkara setelah sidang pembacaan putusan.	√	√	√	√	Salinan putusan perkara pidana	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	

2.3	Indikator: Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi								
1	Menetapkan mediator	√	√	√	√	Penetapan mediator	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Dana bersumber dari biaya proses pihak yang berperkara
2	Melakukan mediasi dengan para pihak	√	√	√	√	Terlaksananya mediasi dengan para pihak	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
3	Membuat laporan hasil mediasi	√	√	√	√	Laporan hasil mediasi	Penegakan dan pelayanan hukum	Penegakan dan pelayanan hukum	
4	Menetapkan hari sidang (jika mediasi gagal)	√	√	√	√	Penetapan hari sidang	Penegakan dan pelayanan hukum	Penegakan dan pelayanan hukum	

Tabel 5 Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100	100
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100	100	100	100

Tabel 6 Rencana Aksi Sasaran Strategis 3

NO	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
3.1	Indikator: Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan								
1	Melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan	√	√	√	√	Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	79.232.000.000
2	Membuat laporan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan	√	√	√	√	Laporan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	

3.2	Indikator: Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang puas mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)								
1	Mengadakan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum	√	√	√	√	Kesepakatan kerjasama antara pengadilan negeri dengan lembaga bantuan hukum	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	28.000.000
2	Menerima layanan bantuan hukum	√	√	√	√	Pemberian layanan bantuan hukum	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
3	Membuat laporan pelaksanaan layanan bantuan hukum	√	√	√	√	Laporan pelaksanaan layanan bantuan hukum	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	

Tabel 7 Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50	50	50	50

Tabel 8 Rencana Aksi Sasaran Strategis 4

NO	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
4.1	Indikator: Persentase putusan perkara perdata yang dirindaklanjuti (dieksekusi)								
1	Menelaah berkas permohonan eksekusi	√	√	√	√	Terlaksananya penelaahan berkas permohonan eksekusi	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Dana bersumber dari pihak yang berperkara
2	Memberitahukan hasil telaah berkas permohonan eksekusi kepada Pemohon	√	√	√	√	Pemberitahuan hasil telaah berkas permohonan eksekusi	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
3	Mengeluarkan penetapan aanmaning	√	√	√	√	Penetapan aanmaning	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	

4	Melaksanakan relaas panggilan Termohon eksekusi untuk melakukan aanmaning	√	√	√	√	Relaas panggilan untuk melaksanakan aanmaning	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
5	Melaksanakan aanmaning	√	√	√	√	Terlaksananya aanmaning	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
6	Membuat BA pelaksanaan putusan dan BA serah terima (Pelaksanaan putusan secara sukarela)	√	√	√	√	BA Pelaksanaan putusan dan BA serah terima	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
7	Mengeluarkan penetapan sita eksekusi	√	√	√	√	Penetapan sita eksekusi	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
8	Melaksanakan relaas pemberitahuan sita eksekusi	√	√	√	√	Relaas pemberitahuan sita eksekusi	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
9	Melaksanakan sita eksekusi	√	√	√	√	Terlaksananya sita eksekusi	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
10	Melaksanakan eksekusi	√	√	√	√	Terlaksananya eksekusi	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	



Pasir Pengaraian, 2 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Rony Suata, S.H., M.H
NIP.19790124 200212 1 004